

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 62 TAHUN 2021 DALAM PENCEGAHAN
STUNTING MELALUI PROGRAM
GERAKAN ORANG TUA ASUH**

ARTIKEL ILMIAH

**Oleh
Salsabilla Syafa Kamila
NPM. 2221020168**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026 M/1448 H**

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 62 TAHUN 2021 DALAM PENCEGAHAN
STUNTING MELALUI PROGRAM
GERAKAN ORANG TUA ASUH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
guna mendapatkan gelar sarjana S1 pada
program studi hukum tata negara

Oleh :

**Salsabilla Syafa Kamila
NPM.2221020168**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Frenki, M.Si

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026 M/1448 H**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan “untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui masyarakat Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran, serta menganalisisnya dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah.” Studi ini menerapkan metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan di Dinas Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat di berbagai kecamatan, dan masyarakat setempat. Temuan penelitian menegaskan program pencegahan stunting sudah diimplementasikan, meskipun belum berlangsung secara optimal. Temuan tersebut terlihat dari partisipasi pemerintah desa yang terbatas dan tidak konsisten, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan program menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dampak program terhadap penurunan angka stunting di berbagai kecamatan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Dari sudut pandang Siyash Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut kurang mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Maka, penting untuk meningkatkan fungsi pemerintah desa, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memastikan program berjalan lebih efisien dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Stunting, Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, *Siyash Tanfidziyyah*

ABSTRACT

This study aims to "examine the role of village governments in preventing and reducing stunting through the Foster Parents Prevent Stunting community in Pesawaran Regency, and analyze it from a Siyasah Tanfidziyyah perspective." This study applies a qualitative methodology through a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation from informants at the Health Office, community health centers in various sub-districts, and the local community. The research findings confirm that the stunting prevention program has been implemented, although it has not been running optimally. This finding is evident in the limited and inconsistent participation of village governments, and the lack of coordination between stakeholders. Furthermore, program implementation faces many challenges, including a lack of human resources, a limited budget, and a lack of public awareness. The program's impact on reducing stunting rates in various sub-districts has not shown significant changes. From a Siyasah Tanfidziyyah perspective, the implementation of this policy does not reflect the principles of trust, justice, and welfare. Therefore, it is important to improve the function of village governments, strengthen inter-institutional coordination, and increase community involvement to ensure the program runs more efficiently and achieves its intended goals.

Keyword: Stunting, Village Government, Policy Implementation, Siyasah Tanfidziyyah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabilla Syafa Kamila
NPM : 2221020168
Prodi : Hukum tata negara
Fakultas : Siyasah Syariyyah

Menyatakan bahwa artikel ilmiah ini yang berjudul ***Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh*** adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk atau yang disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis



Salsabilla Syafa Kamila

NPM. 2221020168



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Artikel : Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh
Nama : Salsabilla Syafa Kamila
NPM : 2221020168
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang munoqasyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017

Muhammad Jayus, M.H.I

NIP. 198802092019031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

NIP. 197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh” yang disusun oleh Salsabilla Syafa Kamila NPM: 2221020168, Program Studi Hukum Tatanegara (SS), telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada hari/tanggal: Senin, 06 juli 2026.

TIM PENGUJI

Ketua : Hasanuddin Muhammad, M.H

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, M.H.I

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Frenki, M.Si

Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَتَّقُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut (kepada Allah) Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar.

(QS. An – Nisa (4): 9)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan rasa bangga yang diiringi dengan rasa kerendahan, maka izinkan penulis untuk mempersembahkan karya artikel ilmiah ini kepada:

1. Panutanku bapak Sudarto dan Pintu Surgaku ibu Nopiyani, terimakasih sebesar-besarnya atas pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan segala bentuk dukungan, semangat, serta memberikan perhatian disetiap harinya hingga penulis mampu untuk menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana. Terimakasih atas nasihat yang diberikan dan terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan anak-anakmu, bapak ibu, anak-anakmu selalu mendoakan kalian semoga bapak ibu panjang umur dan sehat selalu.
2. Kepada cinta kasih saudara kandung penulis Azriel Maulana Ikhsan yang senantiasa memberikan dukungan moral, perhatian, dan doa, yang selalu hadir bahkan dengan cara yang sederhana sekalipun. Terimakasih sudah memberikan canda tawa disela sela lelahku sehingga penulis tetap teguh dan bersemangat dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi dan penyusunan artikel ilmiah ini.
3. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta membalas seluruh kebaikan dengan pahala dan keberkahan yang berlimpah.
4. Almamater kebanggaanku Universitas Islam Raden Intan Lampung, tempat untuk menimba ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat

RIWAYAT HIDUP

Bernama Salsabilla Syafa Kamila lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 Januari 2004, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tua penulis bernama Bapak Sudarto dan Ibu Nopiyani Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Paud Serasi Mawar, pada 2009-2010
2. SD Negeri 3 Perumnas Way Halim, pada tahun 2010-2016
3. SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada Tahun 2016-2019
4. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2019-2022
5. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Salsabilla Syafa Kamila
NPM.2221020168

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh”

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Ibu Nur Rahma, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Frenki, M.Si Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Jayus, M.H.I Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
5. Sivitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Bapak, Ibu dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu.
7. Bapak dan Ibu karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi yang di butuhkan dan membantu penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan sebagainya.

8. Kepada Dinas Kesehatan Dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Teman-teman di kampus UIN Raden Intan Lampung, serta Teman-Teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022, terkhusus Kelas HTN C yang paling penulis sayangi yaitu, Gebby Octaviani, Saputra Andiska, Istiqomah Vatriana, Dwi Kasya, Dwi Rozalia, Heni Nabila, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, semangat, waktu dan canda tawa yang dijalani bersama selama perkuliahan,
10. Teman-teman KKN 46 Kelurahan Karang Maritim yang paling penulis sayangi yaitu, Wahyu Indri Arti, Ola Susila, Siti Mutmainah, Viona Retno Oktaviani, yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang sangat luar biasa bagi penulis.
11. Almamater Tercintaku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang aku banggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Salsabilla Syafa Kamila
NPM.2221020168

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ARTIKEL ILMIAH.....	1
Abstrak	1
<i>Abstrac</i>	2
Pendahuluan	3
Metode Penelitian	7
Pembahasan.....	9
Kesimpulan.....	16
DAFTAR RUJUKAN.....	18
LAMPIRAN.....	20
Lampiran 1 Surat Izin Riset.....	21
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	23
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Penelitian	26
Lampiran 4 Latter Of Acceptance (LOA)	29
Lampiran 5 Bukti Submit Artikel.....	30
Lampiran 6 Blanko Konsultasi.....	31
Lampiran 7 Bukti Turnitin	32
Lampiran 8 Bukti Keterangan Sitasi	33
Lampiran 9 Link Publikasi Jurnal	35

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 62 TAHUN 2021
DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI
PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH**

Salsabilla Syafa Kamila¹, Frenki², Muhammad Jayus³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: salsakamila661@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan “untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui masyarakat Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran, serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasa Tanfidziyyah.” Studi ini menerapkan metodologi kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan di Dinas Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat di berbagai kecamatan, dan masyarakat setempat. Temuan penelitian menegaskan program pencegahan stunting sudah diimplementasikan, meskipun belum berlangsung secara optimal. Temuan tersebut terlihat dari partisipasi pemerintah desa yang terbatas dan tidak konsisten, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan program menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dampak program terhadap penurunan angka stunting di berbagai kecamatan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Dari sudut pandang Siyasa Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut kurang mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Maka, penting untuk meningkatkan fungsi pemerintah desa, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk memastikan program berjalan lebih efisien dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Stunting, Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, *Siyasa Tanfidziyyah*

ABSTRACT

This study aims to "examine the role of village governments in preventing and reducing stunting through the Foster Parents Prevent Stunting community in Pesawaran Regency, and analyze it from a Siyasah Tanfidziyyah perspective." This study applies a qualitative methodology through a descriptive approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation from informants at the Health Office, community health centers in various sub-districts, and the local community. The research findings confirm that the stunting prevention program has been implemented, although it has not been running optimally. This finding is evident in the limited and inconsistent participation of village governments, and the lack of coordination between stakeholders. Furthermore, program implementation faces many challenges, including a lack of human resources, a limited budget, and a lack of public awareness. The program's impact on reducing stunting rates in various sub-districts has not shown significant changes. From a Siyasah Tanfidziyyah perspective, the implementation of this policy does not reflect the principles of trust, justice, and welfare. Therefore, it is important to improve the function of village governments, strengthen inter-institutional coordination, and increase community involvement to ensure the program runs more efficiently and achieves its intended goals.

Keyword: Stunting, Village Government, Policy Implementation, Siyasah Tanfidziyyah

A. Pendahuluan

Anak-anak dengan stunting mengalami kegagalan pertumbuhan sebagai konsekuensi dari kekurangan gizi kronis; akibatnya, mereka memiliki tinggi badan yang abnormal untuk usia mereka atau tinggi badan yang kurang dari minus dua standar deviasi.¹ Stunting didefinisikan sebagai indeks tinggi badan menurut usia (TB/U) atau panjang badan menurut usia (PB/U) di bawah -2, menurut kriteria pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO.²

Keterlambatan fisik, psikologis, intelektual, dan kognitif adalah beberapa efek jangka panjang dari stunting pada anak-anak. Jika gangguan ini berkembang sebelum anak mencapai usia 5 tahun, pengobatannya bisa menjadi sulit; lebih jauh lagi, hal ini bisa terjadi sampai dewasa, meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).³ Kelaparan adalah alasan utama mengapa anak-anak tumbuh terlalu pendek. Bayi dapat mulai mengalami kekurangan gizi ini sejak dalam kandungan. Namun, tidak jarang gejala stunting tidak muncul sampai anak berusia sekitar dua tahun.⁴

Kabupaten Pesawaran, seperti wilayah lain di Indonesia, telah mengidentifikasi stunting sebagai area kunci dalam upaya pembangunan kesehatan. Prevalensi stunting secara nasional telah berhasil ditekan ke angka 19,8%, menurut data SSGI, yang diumumkan pada tahun 2025 menggunakan data PPP 2024.

¹ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "*Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi.*".Pesawaran (2021).

² WHO, "Child Stunting World Health Statistic Data Visualizations Dashboard", 2019.

³ Jurnal Biostatistik and others, "Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak", *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.7454/bikfokes.v1i2.1012>>.

⁴ Wini Nur Auli and others, "Diversifikasi Makanan Gizi Seimbang Dari Hasil Pertanian Desa Sukabandar, Pesawaran Sebagai Pangan Pencegah Stunting", *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.4 (2024), 66–76 <<https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1244>>.

Meskipun turun dari tahun lalu, pencapaian ini masih jauh dari target jangka menengah pemerintah.⁵

Pada saat yang berbeda, kondisi di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan angka stunting di tahun 2024 prevalensi stunting tercatat sebesar 15,5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 10,0% pada tahun 2023, yang menandakan bahwa stunting masi menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup serius oleh karena itu program intervensi sudah berjalan tetapi masih belum memberikan hasil yang optimal dalam menekan prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menargetkan penurunan angka stunting turun menjadi 12,2% pada tahun 2026, target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevelensi 10,36% pada tahun 2030.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, angka stunting masih ditemukan di beberapa kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stunting masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian pemerintah, seperti pada Kecamatan Gedong Tataan di Puskesmas Gedong Tataan tepatnya pada Tahun 2024 angka stunting diperkirakan di 0,22%, tetapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2025 sebesar 2,38%. Wilayah Kecamatan Tegineneng di Puskesmas Trimulyo justru terdapat kenaikan lebih besar lagi yaitu pada Tahun 2024 sebesar 1,01% dan pada Tahun 2025 Sebesar 15,73% dan Kecamatan yang juga mengalami kenaikan serius terkait Stunting di rasakan pada Kecamatan Way Lima di Puskesmas Kota Dalam yaitu pada angka 0,19% Tahun 2024 dan 3,28% Tahun 2025.⁶

Oleh karena itu salah satu upaya sebagai langkah untuk menanggapi meningkatnya kasus stunting, Pemkab Pesawaran mengeluarkan Perbup Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021, yang mengatur peran pemerintah desa pada upaya pencegahan dan penekanan stunting secara terintegritasi. Regulasi

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)", Prevalensi Stunting Nasional, 2024.

⁶ TPPS Kabupaten Pesawaran, "Laporan Percepatan Penurunan Stunting, Data Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran, 2024-2025.," 2024.

tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi desa dalam melaksanakan berbagai program intervensi, termasuk Program Gerakan Orang Tua Asuh. Cegah Stunting, yang dirancang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus dukungan pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko.⁷

Walaupun peraturan telah ditetapkan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada cara regulasi itu diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan. Di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, program Gerakan Orang Tua Asuh sudah dijalankan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan antar Kecamatan dalam hal mutu pelaksanaan, jumlah peserta yang dilibatkan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, tingkat koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan. Selain itu, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan program untuk mengurangi stunting di tingkat kabupaten dan desa, serta sejauh mana program tersebut mematuhi standar yang diuraikan dalam Pasal 5 Huruf (a) Perbup Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021. Peraturan ini membahas berbagai isu, seperti penyebaran kebijakan daerah tentang pencegahan dan pengurangan stunting terpadu kepada masyarakat, pengumpulan data tentang kelompok sasaran dan masalah yang terkait dengan stunting, ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat, dan kondisi penyedia layanan. Permasalahan ini penting karena pelaksanaan program yang tidak sesuai prosedur seringkali berpengaruh pada efektivitas intervensi.

Dalam kajian *Siyasah Tanfidziyyah*, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam aspek pelaksanaan kebijakan (*tanfidz*) di lapangan. *Siyasah Tanfidziyyah* menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan implementasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang telah

⁷ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, “*Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi.*”

ditetapkan, serta kemampuan aparaturnya menjalankan tugas administratif secara efektif demi terwujudnya kemaslahatan Masyarakat.⁸ Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti sudah ditegaskan firman Allah pada Al-Qur'an;

(Q.S An-Nisa':58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan amanah secara bertanggung jawab, termasuk melalui program pencegahan stunting sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kualitas pelaksanaan mengindikasikan bahwa peran eksekutif baik di tingkat pemerintah desa maupun perangkat daerah belum berjalan secara maksimal dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai arahan. Akibatnya, tujuan utama pencegahan dan penurunan stunting belum bisa dicapai secara optimal. Maka, diperlukan analisis mendalam agar bisa mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* benar-benar diterapkan dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut.

Tinjauan terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai program penurunan stunting selama ini lebih banyak menyoroti aspek kolaborasi dan faktor pendukung kebijakan, tetapi belum mengevaluasi secara rinci kepatuhan pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

⁸ Abu Al Hasan and Alahkam Al- Suthaniyyah, *“Prinsip Pelaksanaan Pemerintah Dan Kewajiban Eksekutif Dalam Menjaga Kemaslahatan Publik,”* n.d.

Akibatnya, kualitas implementasi kebijakan belum dapat dinilai secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu juga tidak menguji hubungan antara tingkat kesesuaian implementasi dengan penurunan angka stunting, sehingga efektivitas kebijakan masih belum terpetakan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat kepatuhan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting terhadap ketentuan Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 menilai kontribusinya terhadap penurunan prevalensi stunting, serta mengkaji dinamika implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan *Siyasah Tanfidziyyah*.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, yang menawarkan analisis berbasis prinsip tata kelola dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan, juga belum digunakan dalam kajian topik ini.⁹ Maka, studi ini dirasa perlu untuk menelaah bagaimana Perbup Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 5 Huruf (a) diimplementasikan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, serta menilai kontribusinya terhadap penurunan stunting di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong dalam melangsungkan penelitian dan mendalami permasalahan tersebut. Ketertarikan ini kemudian dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang berjudul, “Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan, artinya informasi akan dikumpulkan di lokasi.¹⁰

Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder untuk datanya. Data untuk penelitian ini berasal dari sumber

⁹ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh *Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021).

¹⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2021).

primer, seperti survei dan wawancara dengan Pemerintah Desa, Masyarakat, Puskesmas Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, dan Way Lima, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, yang bertanggung jawab melaksanakan program pencegahan stunting. Sumber tidak langsung atau sumber sekunder dikonsultasikan ketika data sekunder diperlukan. Buku, artikel, Al-Quran, hadits, dan majalah ilmiah semuanya dianggap sebagai sumber.

Pemerintah Desa Kutoarjo, Desa Bogorejo, dua informan dari Dinas Kesehatan, tiga dari masing-masing Pusat Kesehatan Masyarakat, dan enam dari masyarakat itu sendiri membentuk sampel untuk penelitian ini. Populasi terdiri dari semua masyarakat yang menjadi bagian dari upaya pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021, yang membahas peran pemerintah desa dalam pencegahan dan pengurangan stunting. Sampel ini dipilih oleh penulis karena selaras dengan metodologi yang digunakan, khususnya teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*).¹¹

Wawancara, di mana peneliti dan narasumber berbicara tatap muka untuk mengumpulkan informasi, dokumentasi, di mana peneliti mengamati atau menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek penelitian atau pihak lain yang terkait dengan subjek, dan observasi, di mana peneliti memeriksa keadaan dan situasi di Kabupaten Pesawaran dan Dinas Kesehatan Pesawaran, merupakan tiga metode utama pengumpulan data pada konteks studi ini.¹²

Setelah mengumpulkan data, dilakukan serangkaian langkah untuk analisis kualitatif, termasuk reduksi, penyajian, dan pembuatan kesimpulan. Analisis difokuskan pada “implementasi pasal 5 Huruf (a) Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritasi, yang selanjutnya ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*.”

¹¹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: Renika Cipta, 2014).

¹² Yusuf Muri, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

C. Hasil Pembahasan

1. Implementasi Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 diterbitkan sebagai kebijakan daerah di Kabupaten Pesawaran yang mengatur tanggung jawab pemerintah desa untuk mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting secara terpadu. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional, yakni Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang berfokus pada peran aktif pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan intervensi pencegahan stunting secara terkoordinasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2021 dari Kabupaten Pesawar, pemerintah desa memainkan peran penting dalam memerangi stunting. Pada Pasal 5 Huruf (a), dinyatakan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk: (a) Mensosialisasikan kebijakan daerah tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi kepada masyarakat.¹³

Peran tersebut meliputi koordinasi dengan berbagai pihak, pelaksanaan kegiatan pencegahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi anak melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Artinya, pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat agar program dapat terlaksana secara optimal. Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa, diketahui bahwa pemerintah desa sudah berusaha menyampaikan informasi tentang pencegahan stunting kepada masyarakat melalui posyandu, penyuluhan kesehatan,

¹³ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, “Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi.”

pertemuan desa, dan bantuan dari kader. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan Puskesmas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah stunting, menjaga gizi anak, dan memantau pertumbuhan anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kendala, seperti sebagian masyarakat yang kurang aktif mengikuti kegiatan dan keterbatasan sumber daya. Karena itu, pemerintah desa masih perlu meningkatkan penyampaian informasi agar masyarakat lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting.¹⁴

Pada konteks penelitian ini, pengumpulan data melalui Pemerintah Desa dengan mengambil objek Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana teknis program. Hal ini karena Dinas Kesehatan dan Puskesmas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan layanan kesehatan di wilayah kecamatan dan berhubungan langsung dengan beberapa desa dalam pelaksanaan program stunting. Dengan demikian, data dari Dinas kesehatan dan Puskesmas dianggap dapat mewakili gambaran pelaksanaan program di tingkat desa.

Berdasarkan temuan tersebut bisa diamati dari koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan Dinas Kesehatan yang masih belum berjalan secara maksimal. Upaya pencegahan stunting telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting, antara lain penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan pemerintah desa dalam program pencegahan stunting masih belum menunjukkan konsistensi dan cenderung dilakukan pada kondisi tertentu saja, hal ini diperkuat oleh keterangan dari pihak Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penekanan

¹⁴ Pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran, “Wawancara Dan Observasi Di Kabupaten Pesawaran,” 2026.

stunting, namun pelaksanaannya belum diterapkan secara rutin dan berkesinambungan.¹⁵

Meskipun program telah dijalankan di berbagai wilayah, pelaksanaannya masih belum merata di setiap kecamatan. Perbedaan kondisi wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi hal tersebut. Selain itu, koordinasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa memang sudah dilakukan, tetapi belum berlangsung secara optimal dan masih terbatas pada waktu-waktu tertentu.

Berbagai kegiatan penyempurnaan, termasuk perawatan, pemberian makan, dan pengelolaan tumbuh kembang balita, telah dilakukan di tingkat puskesmas sebagai implementasi teknis. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilakukan dengan baik dan sukses, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendukungnya. Koordinasi antara puskesmas dan pemerintah desa juga telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif, dan keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Di samping itu, pelaksanaan program juga dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan program secara optimal.¹⁶

Dari sudut pandang masyarakat, ditemukan bahwa meskipun sebagian orang menyadari dan terlibat dalam program tersebut, sebagian lainnya masih bingung. Umumnya, pendidikan kesehatan dan pemberian makanan tambahan merupakan bentuk bantuan yang diberikan. Meskipun demikian, dampak program terhadap perbaikan

¹⁵ Fitri Sanawiyah, "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran", 2026.

¹⁶ Puskesmas Kota Dalam Puskesmas Gedong Tataan, Puskesmas Trimulyo, "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Puskesmas," 2026.

kondisi kesehatan anak belum dirasakan secara signifikan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, baik dari segi koordinasi, keterlibatan pemerintah desa, maupun peningkatan kesadaran masyarakat.¹⁷

Hasil penelitian menegaskan pemerintah desa belum bisa melangsungkan tanggung jawabnya secara optimal untuk mencegah dan mengurangi stunting sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa masih kurang efisien dan gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dalam pelaksanaan program, serta belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah desa cenderung hanya muncul pada saat kegiatan tertentu, sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkesinambungan di tingkat masyarakat.

Selain itu, fungsi koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah desa dalam menjalin kerja sama dengan puskesmas, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya juga belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang masih bersifat situasional menyebabkan pelaksanaan program kurang terintegrasi dan tidak berjalan secara efektif. Di sisi lain, peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting, juga belum terlaksana secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa pada implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan upaya pemberdayaan

¹⁷ Masyarakat, "Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran", 2026.

masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Siyasah Tanfidziyyah, atau *al-sulthah al-tanfidziyyah*, adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif negara sesuai dengan hukum. Di sini, kekuasaan untuk membuat dan menegakkan aturan dan peraturan berada di tangan negara. Baik dalam negeri ataupun luar negeri berada di bawah wewenang negara (hubungan internasional). Sebagai cabang dari *fiqh siyasah*, *Siyasah Tanfidziyyah* menganalisis bagaimana aturan dan peraturan suatu negara dipraktikkan. Studi ini membahas lebih jauh daripada sekadar melihat bagaimana hukum dipraktikkan; ia juga mencakup topik-topik seperti konstitusi (termasuk Konstitusi 1945), hubungan masyarakat dengan pemerintah, dan tanggung jawab negara dalam mencukupi hak masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan kewajibannya guna mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban tersebut melalui berbagai langkah nyata, salah satunya dengan upaya penanganan stunting sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pelaksanaan program gerakan orang tua asuh cegah stunting yang dilangsungkan oleh pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran tidak sekadar mencerminkan kebijakan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang melekat pada pemerintah desa dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Kondisi ini

¹⁸ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* yang menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban langsung dalam mengelola urusan masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, pemimpin dianalogikan sebagai seorang penggembala yang bertanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan umat yang dipimpinnya.

Gagasan *maslahah 'ammah* sebagai inti dari *siyasah tanfidziyah* mempunyai korelasi yang kuat dengan tujuan syariat atau "*maqasid al-syari'ah*". Dari penjabaran Al-Syatibi, tujuan dasar ditetapkan syariat Islam ialah untuk menjaga lima unsur pokok atau "*al-dharuriyyat al-khams*", yaitu "menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*)."¹⁹

Upaya pemerintah desa di Kabupaten Pesawaran dalam menekan angka stunting mempunyai korelasi erat terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang diwujudkan melalui pencegahan penyakit serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.²⁰ Di samping itu, upaya tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu melalui peningkatan kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Selain itu, Al-Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*" menegaskan salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, karena hal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial serta keberlangsungan suatu peradaban.²¹

¹⁹ Fathul Mu, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso, "A Review of Maqâshid Sharîa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province", *Al- 'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 2024, 221–44.

²⁰ Fardani Putra, Siti Amalia, and Michelle Aurielle Salim, "Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam Perspektif Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan", 2026, 1–13.

²¹ Al-Mawardi, "*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Jika dilihat dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, upaya yang dilangsungkan pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran dapat dimaknai sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola urusan masyarakat atau “*ri’ayah syu’un al-ummah*”.

Konsep *siyasah tanfidziyyah* sendiri berkaitan dengan kebijakan operasional yang diterapkan secara langsung oleh otoritas yang berwenang demi tercapainya kemaslahatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, seorang pemimpin membawa amanah dalam menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan mencegah timbulnya kemudaratatan.²²

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa berfungsi sebagai perwujudan kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, termasuk kebutuhan gizi serta kesehatan anak dan ibu hamil. Secara teoritis, *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan harus diarahkan pada *masalah ‘ammah* atau kemaslahatan umum. Al-Mawardi dalam “*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*” menjelaskan salah satu kewajiban pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sebab hal tersebut berkorelasi erat terhadap usaha menjaga jiwa atau “*hifz al-nafs*” dan keturunan atau “*hifz al-nasl*”.²³ Maka, penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sejalan dengan prinsip tersebut, karena berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesehatan generasi, serta peningkatan kualitas SDM di masa depan.²⁴

²² Ibn Taimiyah, “*Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*” (Kairo: Dar al Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

²³ Al-Mawardi, “*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*.”

²⁴ M. Yasin al Arif, Sahda Elvareta Herlambang, Frenki, “Peran Pemerintah Desa/Pekon Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi: Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah,” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 797–811, <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i2.220.3>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran apabila dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyah* menunjukkan adanya pelaksanaan amanah kepemimpinan yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat. Berbagai langkah administratif maupun operasional yang dilakukan oleh pemerintah desa mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah*, yaitu upaya menjaga dan mengelola kepentingan masyarakat secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran dapat dimaknai sebagai perwujudan penerapan prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah* dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*. Pemerintah desa tidak sekadar melaksanakan program secara teknis, tetapi juga menjalankan amanah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai syariat guna menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

D. Kesimpulan

Dari temuan penelitian dan analisis yang telah dilangsungkan, bisa ditegaskan “implementasi Pasal 5 Huruf (a) Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran telah berjalan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal.” Kondisi ini terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dan belum berkesinambungan, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan secara maksimal, serta adanya banyak tantangan, yakni keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan program tersebut juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting di sejumlah wilayah. Apabila diamati dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, implementasi kebijakan ini belum seluruhnya mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah desa tetap menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung

jawab kepemimpinan dalam mengelola urusan masyarakat atau “*ri’ayah syu’un al-ummah*”, khususnya dalam pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi penguatan peran pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi partisipasi masyarakat, agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip *maslahah ‘ammah* dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al Hasan and Alahkam Al- Suthaniyyah. *“Prinsip Pelaksanaan Pemerintah Dan Kewajiban Eksekutif Dalam Menjaga Kemaslahatan Publik,”* n.d.
- Al-Mawardi. *“al-Ahkam Al-Sultaniyyah.”* Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Auli, Wini Nur, Gayatri Simanullang, Syahrizal Nasution, Ihsanti Dwi Rahayu, and Atri Sri Ulandari. “Diversifikasi Makanan Gizi Seimbang Dari Hasil Pertanian Desa Sukabanjar, Pesawaran Sebagai Pangan Pencegah Stunting.” *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2024): 66–76. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1244>.
- Biostatistik, Jurnal, Informatika Kesehatan, Aprilia Daracantika, and Aprilia Daracantika. “Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak.” *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v1i2.1012>.
- Ibn Taimiyah. *“Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Islah Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah.”* Kairo: Dar al Kutub al-’Ilmiyyah, 1998.
- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. “‘Survei Status Gizi Indonesia (SSGI),’ Prevalensi Stunting Nasional,” 2024.
- Masyarakat. “Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran,” 2026.
- Mu, Fathul, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso. “A Review of Maqâshid Sharîa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province.” *Al- ‘Adalah: Jurnal Hukum Islam*, 2024, 221–44.
- Muhammad Iqbal. *“Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum.”* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran. “Wawancara Dan Observasi Di Kabupaten Pesawaran,” 2026.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. “Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan

- Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritas,,” no. Pesawaran (2021).
- Puskesmas Gedong Tataan, Puskesmas Tegineneng, Puskesmas Way Lima. “Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Puskesmas,” 2026.
- Putra, Fardani, Siti Amalia, and Michelle Aurielle Salim. “Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam Perspektif Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan,” no. 2 (2026): 1–13.
- Sahda Elvareta Herlambang, Frenki, M. Yasin al Arif. “Peran Pemerintah Desa/Pekon Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi: Tinjauan Siyasa Tanfidziyah.” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 797–811. <https://doi.org/10.47134/jpa.v1i2.220.3>.
- Sanawiyah, Fitri. “Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran,” 2026.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2021.
- Suharsimi Arikunto. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.” Jakarta: Renika Cipta, 2014.
- TPPS Kabupaten Pesawaran. ““Laporan Percepatan Penurunan Stunting,’ Data Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran, 2024-2025.” 2024.
- WHO. “Child Stunting World Health Statistic Data Visualizations Dashboard,” 2019.
- Yusuf Muri. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*.” Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1585/Un.16/DS/PP.009/04/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

09 April 2026

Kepada Yth.
Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Dinas Kesehatan kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : SALSABILLA SYAFA KAMILA
NPM : 2221020168
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRITAS MELALUI PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (Studi di Dinas Kesehatan Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rodiah Nurl

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. SALSABILLA SYAFA KAMILA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmín I, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syarlah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1585/Un.16/DS/PP.009/04/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

09 April 2026

Kepada Yth.
Bupati Pesawaran
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesawaran kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : SALSABILLA SYAFA KAMILA
NPM : 2221020168
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRITAS MELALUI PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (Studi di Dinas Kesehatan Pesawaran)
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. SALSABILLA SYAFA KAMILA

Lampira 2 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS KESEHATAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran
Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran 35366
Telp : (0721) 8032004 Fax : (0721) 8032004 Laman : dinkespesawarankab@gmail.com

Gedong Tataan, 16 April 2026

Nomor : 800/ 603 /IV.02/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran Nomor : 070/35/VI.01/2026, tanggal 16 April 2026 tentang Izin Riset Mahasiswa/I Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berikut:

Nama : Salsabilla Syafa Kamila
NIM : 2221020168
Judul : **"ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF (a) PERATURAN BUPATI PESAWARAN 62 TAHUN 2021 TENTANG PERAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI PROGRAM SEKOLAH LANSIA DAN GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (STUDI DI DINAS KESEHATAN)"**

Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menyetujui untuk mengadakan Penelitian di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan judul Penelitian dan Pengambilan data seperti tersebut di atas, dapat berhubungan dan berkoordinasi dengan pihak terkait di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
3. Wajib menyampaikan salinan resmi hasil Penelitian dan Pengambilan data pada waktu akhir penelitian telah selesai.

Demikian

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.


**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESAWARAN**
dr. MEDIA APRILIANA, M.K.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP : 19660414 200212 2 002

Tembusan : Yth,

1. Bupati Pesawaran (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya Kedondong No. 619 Desa Way Layap Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran

REKOMENDASI PENELITIAN / RISET

Nomor : 070/ 35 /VI.01/2026

- MEMBACA** : Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.1585/Un.16/DS/PP.009/04/2026 Tanggal 9 April 2026 Perihal Permohonan Izin Riset.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Pasal 5 Ayat (2)
3. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 08).
4. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, Penelitian Dalam Rangka Tugas Akhir Pendidikan/Sekolah Dalam Negeri Dan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah Di Kabupaten Pesawaran.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA:

Nama/NPP : **SALSABILLA SYAFA KAMILA/2221020168**
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
Lamanya/Mulai : April s/d Juni 2026
Tujuan : Penyusunan Tugas Akhir
Judul : "ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING (Studi di Dinas Kesehatan Pesawaran)"

Catatan

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan Penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi ini
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Gedong Tataan

Pada Tanggal : April 2026

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PESAWARAN
Kepala Bidang Teknologi Wawasan Kebangsaan dan
Kerjasama Bangsa,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesawaran (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara dan Data



TABEL 48

STATUS GIZ BALITA BERDASARKAN INDEKS BALITA TOLAK BERIT MENURUT KECAKUPAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG	BALITA BERUTUKUR (KURANG BERAT)		JUMLAH BALITA YANG DIUKUR		BALITA RENDAH (TANPA BERAT)		BALITA GIZI KURANG (BBWT < 24.5%)		BALITA GIZI BERIKUTAN (BBWT > 3.5%)	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	Pondok Aren	Pondok Aren	825	57	6.91	825	46	5.58	825	41	4.98	0	0.00
2	Pondok Aren	Pondok Aren	1296	72	5.56	1296	9	0.69	1296	39	3.01	0	0.00
3	Way Batai	Bund	2321	101	4.35	2321	85	3.66	2321	85	3.66	0	0.00
4	Tulak Pandan	Huwam	2043	14	0.69	2043	29	1.42	2043	6	0.29	0	0.00
5	Kedondong	Kedondong	2323	83	3.57	2323	62	2.67	2324	36	1.55	0	0.00
6	Way Lima	Kedondong	2190	119	5.43	2190	4	0.18	2190	62	2.83	0	0.00
7	Gedong Tulan	Gedong Tulan	3199	61	1.91	3199	7	0.22	3199	29	0.91	0	0.00
8	Mogot Katon	Kedondong	1527	8	0.42	1527	15	0.98	1527	19	1.24	0	0.00
9	Mogot Katon	Rumorejo	1694	34	2.01	1694	16	0.95	1693	38	2.24	0	0.00
10	Mogot Katon	Togorog	1538	103	6.70	1538	16	1.04	1538	26	1.69	0	0.00
11	Way Katan	Togorog	914	1	0.11	914	46	5.03	914	0	0.00	0	0.00
12	Mogot Katon	Togorog	1588	54	3.40	1587	16	1.01	1588	66	4.16	0	0.00
13	Mogot Katon	Mogot Katon	1507	52	3.45	1507	7	0.46	1502	12	0.79	0	0.00
14	Mogot Katon	Gurung Sari	621	26	4.19	621	0	0.00	621	17	2.74	0	0.00
15	Mogot Katon	Kedondong	941	65	6.91	941	6	0.64	941	49	5.21	0	0.00
Jumlah Keseluruhan			24478	630	2.57	24472	334	1.37	24467	631	2.57	0	0.00

Sumber: Buletin Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

TABEL 48

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/L, TB/L, DAN BB/TB DAN TATA LAKSANA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG	BALITA BERAT BODAS (KUBANG BERU)		JUMLAH BALITA YANG DUKUR TINGGI BODAS		BALITA PENDEK (TIBU)		JUMLAH BALITA YANG BAKUR DARI TINGGI BODAS		BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < 2 s.d 3 SD)		BALITA GIZI BURUK (BB/TB : < 3 SD)	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Pondok Padas	Pondoka	528	47	8,90	528	31	5,87	528	27	5,11	0	0,00		
2	Puding Cemiri	Puding Cemiri	809	51	6,30	809	50	6,18	809	39	4,82	0	0,00		
3	Wiy Rabi	Bund	1.686	89	5,24	1.686	17	0,90	1.686	40	2,41	0	0,00		
4	Trek Punden	Hunra	1.491	78	5,23	1.491	27	1,81	1.491	46	3,08	0	0,00		
5	Kedondong	Kedondong	1.530	48	3,14	1.530	97	3,73	1.530	21	1,37	0	0,00		
6	Wiy Lina	Kota Dalam	1.404	60	4,27	1.404	46	3,28	1.404	35	2,55	0	0,00		
7	Gedong Talam	Gedong Talam	1.384	32	2,31	1.384	33	2,38	1.384	33	2,38	0	0,00		
8	Negeri Katon	Kelapo	1.009	43	4,26	1.009	7	0,69	1.009	10	0,90	0	0,00		
9	Tegayung	Tegayung	506	62	12,25	506	3	0,59	506	64	12,65	0	0,00		
10	Marga Punden	Tinjojo	697	29	4,16	697	3	0,43	697	34	4,88	0	0,00		
11	Wiy Khatul	Gurung Sari	498	94	18,88	498	0	0,00	498	66	13,25	0	0,00		
		Kota Jawa	640	81	9,53	640	4	0,63	640	64	10,00	1	0,16		
JUMLAH (KABUPATEN)			15.939	790	4,95	15.939	364	2,22	15.939	579	3,62	3	0,02		

Sumber: Buletin Kesehatan Masyarakat dan Data Kesehatan Kabupaten Pesawaran

Lampiran 4 Letter Of Acceptance (LOA)



ISSN (online) : 2810-0573

Letter of Acceptance (LoA)
No. 299-A/LoA-KJSK/IV/2026

The Editor-in-Chief of *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* hereby certifies that the following article:

Authors:
Salsabilla Syafa Kamila, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Frenki, Muhammad Jayus, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Title:
Analisis Kebijakan Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 dalam Pencegahan Stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh

has been peer-reviewed and officially accepted for publication in *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, Number 2, which is scheduled to be published on **May 25, 2026**.

We congratulate the authors on this academic achievement. It is our sincere hope that this work will make a meaningful contribution to the development of Islamic studies and inspire further research in the field. Thank you for your contribution to the dissemination of scholarly knowledge

Nganjuk, April 29, 2026

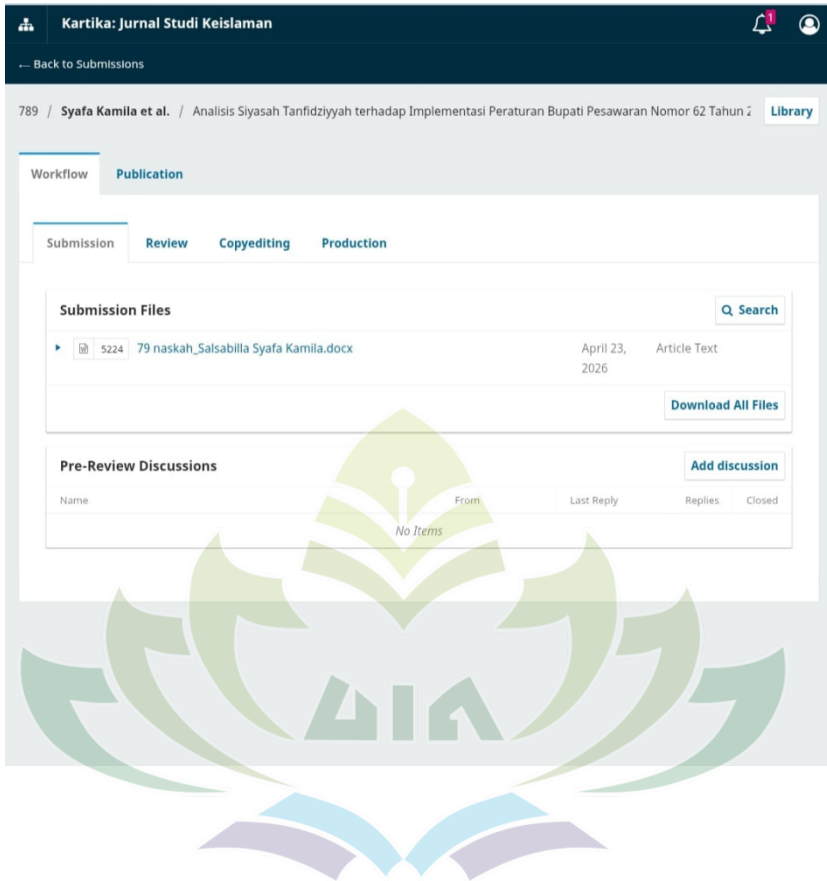
Editor-in-Chief
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman


Dr. Juni Iswanto, S.E., M.M

<https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika>

 Dikirim dengan Certificate

Lampiran 5 Bukti Sumbit Artikel



Kartika: Jurnal Studi Keislaman

— Back to Submissions

789 / Syafa Kamila et al. / Analisis Siyash Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2 [Library](#)

Workflow **Publication**

Submission **Review** **Copyediting** **Production**

Submission Files [Q Search](#)

►		5224	79 naskah_Salsabilla Syafa Kamila.docx	April 23, 2026	Article Text
---	---	------	--	----------------	--------------

[Download All Files](#)

Pre-Review Discussions [Add discussion](#)

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
No Items				

Lampiran 6 Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

KARTU KONSULTASI

Nama : Salsabilla Syafa Kamila
NPM : 2221020168
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Artikel Ilmiah : "Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Dalam Pencegahan Stunting Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh"

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			I	II
1.	11 Desember 2025	Bimbingan Pengajuan Judul, Dan Proposal	/	g
2.	15 Desember 2025	Bimbingan Revisi Proposal Latar Belakang, dan Metode Penelitian	/	f
3.	23 Desember 2025	ACC Proposal Untuk diseminarkan oleh Pembimbing I	/	
4.	7 April 2026	Revisi Proposal setelah seminar proposal	/	g
5.	23 April 2026	Bimbingan Hasil Revisi	/	g
6.	27 April 2026	Konsultasi Artikel dan rumah jurnal	/	g
7.	30 April 2026	Revisi Artikel terkait dengan sistematika atau pedoman penulisan	/	g
8.	04 Mei 2026	Bimbingan hasil revisi dan Konsultasi Hasil Artikel	/	g
9.	05 Mei 2026	Konsultasi ACC Artikel dan LoA	/	g

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017

Muhammad Javus, M.H.I

NIP. 198802092019031007

Lampiran 7 Bukti Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2287/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.**
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 62 TAHUN 2021 DALAM PENCEGAHAN
STUNTING MELALUI PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Salsabilla Syafa Kamila	2221020168	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 25% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Juni 2026
Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

Lampiran 8 Bukti Keterangan Sitasi

turnitin Page 1 of 25 - Cover Page Submission ID: tnmold::3618142113974

RADEN INTAN LIBRARY

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 62...**

SKRIPSI 2

Document Details

Submission ID	tnmold::3618142113974	19 Pages
Submission Date	8 Jun 2026, 13:37 GMT+7	3,808 Words
Download Date	9 Jun 2026, 14:59 GMT+7	26,800 Characters
File Name	FILE REVISI ARTIKEL TURNITIN SALSAL.docx	
File Size	158.4 KB	

turnitin Page 1 of 25 - Cover Page Submission ID: tnmold::3618142113974

CS Scan with CamScanner

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 22%  Internet sources
- 13%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Top Sources

22%  Internet sources
13%  Publications
15%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	daerah.peraturanpedia.id	3%
2	Internet	
	lptnunganjuk.com	3%
3	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	2%
4	Internet	
	jurnal.jompard.com	1%
5	Internet	
	e-journal.metrouniv.ac.id	1%
6	Student papers	
	Universitas Hayam Wuruk Perbanas on 2026-05-04	<1%
7	Internet	
	jdih-bagkum.lampungtimurkab.go.id	<1%
8	Student papers	
	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto on 2025-10-10	<1%
9	Student papers	
	UIN Raden Intan Lampung on 2025-03-18	<1%
10	Student papers	
	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-04-06	<1%
11	Internet	
	ejournal.liahtp.ac.id	<1%

**ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 62 TAHUN
2021 DALAM PENCEGAHAN STUNTING MELALUI
PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH**

ARTIKEL ILMIAH

Oleh

Salsabilla Syafa Kamila
NPM. 2221020168

Acc
Date
30/3/26

Acc
Date

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2026 M/1448 H

Acc
Date
3/8
2026
Husnul

Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 dalam Pencegahan Stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh

Salsabilla Syafa Kamila, Frenki, Muhammad Jayus
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: salsakamila661@gmail.com

Abstrack

This study aims to examine the role of the village government in efforts to prevent and reduce stunting through the Foster Parent Movement to Prevent Stunting in Pesawaran Regency, and analyze it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation with informants from the Health Office, health centers in several sub-districts, and the community. The results of the study show that the implementation of the stunting prevention program has been carried out, but it has not run optimally. This can be seen from the involvement of the village government which is still limited and has not taken place consistently, as well as coordination between parties that has not been effective. In addition, the implementation of the program also faces various obstacles, such as limited human resources, budget limitations, and low levels of public awareness. The impact of the program on reducing stunting rates in several sub-districts has also not shown significant changes. Viewed from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of the policy has not fully reflected the principles of trust, justice, and benefits. Therefore, efforts are needed to increase the role of the village government, strengthen coordination between institutions, and increase community participation so that the program can run more effectively and achieve the expected goals.

Keywords: Stunting, Village Government, Policy Implementation, Siyasah Tanfidziyyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran, serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Dinas Kesehatan, puskesmas di beberapa kecamatan, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dan belum berlangsung secara konsisten, serta koordinasi antar pihak yang belum efektif. Selain itu, pelaksanaan program juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Dampak program terhadap penurunan angka stunting di beberapa kecamatan juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan peran pemerintah desa, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata Kunci: Stunting, Pemerintah Desa, Implementasi Kebijakan, Siyasah Tanfidziyyah

Copyright: © 2026, The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak pendek atau sangat pendek untuk usianya tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi.¹ Menurut standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO), kondisi stunting ditentukan berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang berada di bawah -2.² Stunting memiliki dampak jangka panjang berupa terhambatnya perkembangan fisik, mental, intelektual, dan kognitif anak. Kondisi ini sulit diperbaiki jika terjadi sebelum usia 5 tahun, sehingga dapat berlanjut hingga dewasa serta meningkatkan risiko melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR).³ Penyebab utama stunting adalah kondisi malnutrisi. Kekurangan gizi ini sudah dapat terjadi sejak awal kehidupan, bahkan ketika bayi masih berada dalam kandungan. Namun, tanda-tanda gangguan pertumbuhan umumnya baru terlihat saat anak mencapai usia sekitar 2 tahun.⁴

Stunting masih menjadi isu sentral dalam pembangunan kesehatan nasional, termasuk di Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas intervensi. Data *Survei Status Gizi Indonesia* (SSGI) menunjukkan bahwa angka stunting nasional yang diumumkan pada tahun 2025 (menggunakan data SSGI 2024), prevalensi stunting nasional berhasil diturunkan menjadi 19,8%. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, namun capaian tersebut masih belum memenuhi target pemerintah pada periode jangka menengah.⁵ Pada saat yang berbeda, kondisi di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan angka stunting di tahun 2024 prevalensi stunting tercatat sebesar 15,5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 10,0% pada tahun 2023, yang menandakan bahwa stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup serius oleh karena itu program intervensi sudah berjalan tetapi masih belum memberikan hasil yang optimal dalam menekan prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menargetkan penurunan angka stunting turun menjadi 12,2% pada tahun 2026, target tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Lampung yang menargetkan prevalensi 10,36% pada tahun 2030.

¹ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi," Pesawaran (2021).

² WHO, "Child Stunting World Health Statistic Data Visualizations Dashboard," 2019.

³ Jurnal Biostatistik et al., "Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak," *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.7454/bikofokes.v1i2.1012>.

⁴ Wini Nur Auli et al., "Diversifikasi Makanan Gizi Seimbang Dari Hasil Pertanian Desa Sukabanjar, Pesawaran Sebagai Pangan Pencegah Stunting," *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2024): 66–76, <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1244>.

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)", Prevalensi Stunting Nasional, 2024.

Berdasarkan data pada wilayah yang lain seperti pada Kecamatan Gedong Tataan di Puskesmas Gedong Tataan Desa Kutoarjo tepatnya pada Tahun 2024 angka stunting diperkirakan di 0,22%, tetapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2025 sebesar 2,38%. Wilayah Kecamatan Tegineneng di Puskesmas Trimulyo Desa Trimulyo justru terdapat kenaikan lebih besar lagi yaitu pada Tahun 2024 sebesar 1,01% dan pada Tahun 2025 Sebesar 15,73% dan Kecamatan yang juga mengalami kenaikan serius terkait Stunting di rasakan pada Kecamatan Way Lima di Puskesmas Kota Dalam yaitu pada angka 0,19% Tahun 2024 dan 3,28% Tahun 2025.⁶

Oleh karena itu salah satu upaya sebagai langkah untuk menanggapi meningkatnya kasus stunting, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021, yang mengatur peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi. Regulasi tersebut berfungsi sebagai dasar hukum bagi desa dalam melaksanakan berbagai program intervensi, termasuk Program Gerakan Orang Tua Asuh. Cegah Stunting, yang dirancang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus dukungan pemenuhan gizi bagi keluarga berisiko.⁷

Walaupun peraturan telah ditetapkan, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada cara regulasi itu diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan. Di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, program Gerakan Orang Tua Asuh sudah dijalankan, tetapi terdapat variasi yang cukup besar antar Kecamatan dalam hal mutu pelaksanaan, jumlah peserta yang dilibatkan, frekuensi pelaksanaan kegiatan, serta tingkat koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keraguan terkait apakah pelaksanaan program tersebut benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 yang mencakup beberapa aspek, antara lain mensosialisasikan kebijakan daerah tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi kepada masyarakat, hingga melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya, dari beberapa aspek tersebut menimbulkan pertanyaan apakah implementasi program tersebut sudah berkontribusi nyata terhadap penurunan stunting di tingkat desa maupun kabupaten. Permasalahan ini penting karena pelaksanaan program yang tidak sesuai prosedur seringkali berpengaruh pada efektivitas intervensi.

Dalam kajian *Siyasah Tanfidziyyah*, situasi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam aspek pelaksanaan kebijakan (*tanfidz*) di lapangan. *Siyasah Tanfidziyyah* menegaskan

⁶ TPPS Kabupaten Pesawaran, "Laporan Percepatan Penurunan Stunting, Data Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran, 2024-2025," 2024.

⁷ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi."

bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan implementasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, serta kemampuan aparat pemerintah menjalankan tugas administratif secara efektif demi terwujudnya kemaslahatan Masyarakat.⁸ Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an; (Q.S An-Nisa':58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan amanah secara bertanggung jawab, termasuk melalui program pencegahan stunting sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Kualitas pelaksanaan mengindikasikan bahwa peran eksekutif baik di tingkat pemerintah desa maupun perangkat daerah belum berjalan secara maksimal dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai arahan. Akibatnya, tujuan utama pencegahan dan penurunan stunting belum dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Siyasaah Tanfidziyyah* benar-benar diterapkan dalam implementasi Peraturan Bupati tersebut.⁹

Tinjauan terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai program penurunan stunting selama ini lebih banyak menyoroti aspek kolaborasi dan faktor pendukung kebijakan, tetapi belum mengevaluasi secara rinci kepatuhan pelaksanaan program yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Akibatnya, kualitas implementasi kebijakan belum dapat dinilai secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu juga tidak menguji hubungan antara tingkat kesesuaian implementasi dengan penurunan angka stunting, sehingga efektivitas kebijakan masih belum terpetakan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat kepatuhan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting terhadap ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 menilai kontribusinya terhadap penurunan prevalensi stunting, serta mengkaji dinamika implementasi kebijakan tersebut melalui pendekatan *Siyasaah Tanfidziyyah*.

⁸ Abu Al Hasan and Alahkam Al- Suthaniyyah, "Prinsip Pelaksanaan Pemerintah Dan Kewajiban Eksekutif Dalam Menjaga Kemaslahatan Publik," n.d.

⁹ Wahbah Az-zuhaili, "Pelaksanaan Kebijakan Dan Penerapan Prinsip Kemaslahatan Dalam Administrasi Pemerintahan Islam," *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adilatuhu*, n.d.

Perspektif *Siyasaah Tanfidziyyah*, yang menawarkan analisis berbasis prinsip tata kelola dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan, juga belum digunakan dalam kajian topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Pasal 5 diimplementasikan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, serta menilai kontribusinya terhadap penurunan stunting di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dan mendalami permasalahan tersebut. Ketertarikan ini kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul, “Analisis *Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritas Melalui Program Geraka Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Studi Di Dinas Kesehatan Pesawaran)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data yang berasal dari berbagai sumber tertulis, tanpa melibatkan proses pengambilan data secara langsung di lapangan.¹⁰

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, data primer dihasilkan melalui metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat survei yang didapat langsung dari Kecamatan Gedong Tataan (Puskesmas Gedong Tataan), Kecamatan Tegineneng (Puskesmas Trimulyo), dan Kecamatan Way Lima (Puskesmas Kota Dalam), Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan stunting, dan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung atau sumber kedua yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Populasi dan Sampel pada penelitian ini yaitu populasi terdiri dari 2 informan Dinas Kesehatan, 3 informan dari masing-masing Puskesmas, dan 6 Masyarakat dari masing-masing Kecamatan yang menjadi subjek pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegritas, dan Penelitian ini yang menjadi sampel yaitu, Dinas Kesehatan terdiri dari 2 Sampel, 3 Puskesmas, dan 6 Masyarakat. Penulis mengambil sampel tersebut karena sudah sesuai dengan teknik yang diambil yaitu teknik *purposive sampling*.¹¹

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹¹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” (Jakarta: Renika Cipta, 2014).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu, observasi yang dilakukan dengan mengamati kondisi dan situasi yang ada di Kabupaten Pesawaran dan Dinas Kesehatan Pesawaran, selanjutnya yaitu wawancara yang merupakan proses komunikasi tatap muka antara peneliti dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan mengamati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian atau pihak lain terkait subjek tersebut.¹² Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada implementasi pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi, yang selanjutnya ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*.

C. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 diterbitkan sebagai kebijakan daerah di Kabupaten Pesawaran yang mengatur tanggung jawab pemerintah desa dalam mendukung percepatan penurunan dan pencegahan stunting secara terpadu. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan peran aktif pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan intervensi pencegahan stunting secara terkoordinasi.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi yang terdapat dalam pasal 5 yaitu, (a) Mensosialisasikan kebijakan daerah tentang pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi kepada Masyarakat, (b) Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya, (c) Penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa, (d) Membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Pelaku Desa lainnya yang terkait pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, (e) Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai Sekretariat bersama yang berfungsi sebagai ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses

¹² Yusuf Muri, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan" (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan social, (f) Menyelenggarakan rembuk stunting Desa, (g) Meningkatkan pelayanan posyandu, pelayanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan hidup sehat pada PAUD dan kegiatan lainnya, dan (h) Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan.¹³

Peran tersebut meliputi koordinasi dengan berbagai pihak, pelaksanaan kegiatan pencegahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan pemenuhan gizi anak melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting. Artinya, pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat agar program dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, pengambilan data tidak dilakukan langsung di tingkat desa, melainkan melalui kecamatan dengan mengambil objek Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai pelaksana teknis program. Hal ini karena Dinas Kesehatan dan Puskesmas memiliki peran penting dalam mengoordinasikan layanan kesehatan di wilayah kecamatan dan berhubungan langsung dengan beberapa desa dalam pelaksanaan program stunting. Dengan demikian, data dari Dinas kesehatan dan Puskesmas dianggap dapat mewakili gambaran pelaksanaan program di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan stunting sudah dijalankan, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan Dinas Kesehatan yang masih belum berjalan secara maksimal. Upaya pencegahan stunting telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dalam program gerakan orang tua asuh cegah stunting, antara lain penyuluhan, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting. Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan pemerintah desa dalam program pencegahan stunting masih belum menunjukkan konsistensi dan cenderung dilakukan pada kondisi tertentu saja. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari pihak Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.¹⁴

Meskipun program telah dijalankan di berbagai wilayah, pelaksanaannya masih belum merata di setiap kecamatan. Perbedaan kondisi wilayah, keterbatasan sumber daya

¹³ Pemerintah Kabupaten Pesawaran, "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi."

¹⁴ Fitri Sanawiyah, "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran," 2026.

manusia, serta keterbatasan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi hal tersebut. Selain itu, koordinasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa memang sudah dilakukan, tetapi belum berlangsung secara optimal dan masih terbatas pada waktu-waktu tertentu.

Pada tingkat puskesmas sebagai pelaksana teknis, berbagai kegiatan pencegahan stunting telah dilaksanakan, seperti penyuluhan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pemberian makanan tambahan. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sehingga dampaknya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Koordinasi antara puskesmas dan pemerintah desa juga telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif, dan keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Di samping itu, pelaksanaan program juga dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan anggaran, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tujuan program secara optimal.¹⁵

Dari sisi masyarakat, diketahui bahwa sebagian masyarakat telah mengetahui dan mengikuti program yang dilaksanakan, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami program tersebut secara menyeluruh. Bentuk bantuan yang diberikan umumnya berupa makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan. Meskipun demikian, dampak program terhadap perbaikan kondisi kesehatan anak belum dirasakan secara signifikan, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, baik dari segi koordinasi, keterlibatan pemerintah desa, maupun peningkatan kesadaran masyarakat.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa masih belum optimal dan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dalam pelaksanaan program, serta belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keterlibatan pemerintah desa cenderung hanya muncul pada saat kegiatan

¹⁵ Puskesmas Way Lima Puskesmas Gedong Tataan, Puskesmas Tegineneng. "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Puskesmas," 2026.

¹⁶ Masyarakat, "Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran," 2026.

tertentu, sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan program secara menyeluruh dan berkesinambungan di tingkat masyarakat.

Selain itu, fungsi koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah desa dalam menjalin kerja sama dengan puskesmas, Dinas Kesehatan, serta pihak terkait lainnya juga belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang masih bersifat situasional menyebabkan pelaksanaan program kurang terintegrasi dan tidak berjalan secara efektif. Di sisi lain, peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting, juga belum terlaksana secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Analisis Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Siyasah Tanfidziyyah adalah tugas melaksanakan Undang- Undang untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Negara menjalankan kebijakan yang mencakup urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan salah satu cabang dalam *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kajian ini tidak hanya berfokus pada implementasi hukum semata, tetapi juga meliputi pembahasan mengenai konstitusi seperti UUD, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak masyarakat yang menjadi kewajiban negara.¹⁷ Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan kewajibannya guna mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban tersebut melalui berbagai langkah nyata, salah satunya dengan upaya penanganan stunting sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Pelaksanaan program gerakan orang tua asuh cegah stunting yang

¹⁷ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

dilakukan oleh pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran tidak sekedar mencerminkan kebijakan teknis, tetapi juga menunjukkan adanya tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang melekat pada pemerintah desa dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* yang menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban langsung dalam mengelola urusan masyarakat demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, pemimpin dianalogikan sebagai seorang penggembala yang bertanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan umat yang dipimpinnya.

Gagasan *masalah 'ammah* sebagai inti dari *siyasah tanfidziyyah* memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Menurut Al-Syatibi, tujuan utama ditetapkan syariat Islam adalah untuk melindungi lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*).¹⁸

Upaya pemerintah desa di Kabupaten Pesawaran dalam menekan angka stunting memiliki keterkaitan erat dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang diwujudkan melalui pencegahan penyakit serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Di samping itu, upaya tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu melalui peningkatan kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Selain itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, karena hal tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial serta keberlangsungan suatu peradaban.¹⁹

Jika dilihat dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kabupaten Pesawaran dapat dimaknai sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab pemimpin dalam mengelola urusan masyarakat (*ri'ayah syu'uni al-ummah*). Konsep *siyasah tanfidziyyah* sendiri berkaitan dengan kebijakan operasional yang diterapkan secara langsung oleh otoritas yang berwenang demi tercapainya kemaslahatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, seorang pemimpin memikul amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mencegah timbulnya kemudharatan.²⁰

Dalam konteks tersebut, pemerintah desa berfungsi sebagai perwujudan kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, "*al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*" (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

¹⁹ Al-Mawardi, "*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

²⁰ Ibn Taimiyah, "*Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyyah*" (Kairo: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

dasar masyarakat, termasuk kebutuhan gizi serta kesehatan anak dan ibu hamil. Secara teoritis, *siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa setiap pelaksanaan kebijakan harus diarahkan pada *masalah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa salah satu kewajiban pemimpin adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, karena hal ini berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).²¹ Oleh karena itu, penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sejalan dengan prinsip tersebut, karena berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan hidup, kesehatan generasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran apabila dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* menunjukkan adanya pelaksanaan amanah kepemimpinan yang berfokus pada kemaslahatan masyarakat. Berbagai langkah administratif maupun operasional yang dilakukan oleh pemerintah desa mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah*, yaitu upaya menjaga dan mengelola kepentingan masyarakat secara menyeluruh serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran dapat dimaknai sebagai perwujudan penerapan prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah* dalam kerangka *siyasah tanfidziyyah*. Pemerintah desa tidak sekadar melaksanakan program secara teknis, tetapi juga menjalankan amanah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai syariat guna menjamin kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa implementasi Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Pesawaran telah berjalan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Kondisi ini terlihat dari keterlibatan pemerintah desa yang masih terbatas dan belum berkesinambungan, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan secara maksimal, serta adanya berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program tersebut juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting di sejumlah wilayah. Apabila ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyyah*, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan

²¹ Al-Mawardi, "al-Ahkam Al-Sultaniyyah."

pemerintah desa tetap menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan dalam mengelola urusan masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*), khususnya dalam pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi penguatan peran pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi partisipasi masyarakat, agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip *masalah 'ammah* dalam kerangka *siyasaah tanfidziyyah*.

Referensi

- Abu Al Hasan and Alahkam Al- Suthaniyyah. "Prinsip Pelaksanaan Pemerintah Dan Kewajiban Eksekutif Dalam Menjaga Kemaslahatan Publik," n.d.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (2003) "*al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*." Beirut: Dar al-Kutub al' Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1996). "*al-Ahkam Al-Sultaniyyah*." Beirut: Dar al-Fikr.
- Auli, Wini Nur, Gayatri Simanullang, Syahrizal Nasution, Ihsanti Dwi Rahayu, and Atri Sri Ulandari. (2024). "Diversifikasi Makanan Gizi Seimbang Dari Hasil Pertanian Desa Sukabanyar, Pesawaran Sebagai Pangan Pencegah Stunting." *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4: 66–76. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v3i4.1244>.
- Biostatistik, Jurnal, Informatika Kesehatan, Aprilia Daracantika, and Aprilia Daracantika. (2021). "Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak." *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan* 1, no. 2. <https://doi.org/10.7454/bikfokes.v1i2.1012>.
- Ibn Taimiyah. (1998). "*Al-Siyasaah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*." Cairo: Dar al Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). "Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting Nasional,".
- Masyarakat. (2026). "Wawancara Dan Observasi Masyarakat Kabupaten Pesawaran,".
- Muhammad Iqbal. (2012). "*Fiqh Siyasaah: Konsektualisasi Doktrin Politik Hukum*." Jakarta: Rajawali Pers.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2021). "Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi,".
- Puskesmas Gedong Tataan, Puskesmas Tegineneng, Puskesmas Way Lima. (2026). "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Puskesmas,".
- Sanawiyah, Fitri. (2026). "Wawancara Dan Observasi Penelitian Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran," 2026.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2014). "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*." Jakarta: Renika Cipta,
- TPPS Kabupaten Pesawaran. (2024). "Laporan Percepatan Penurunan Stunting, Data Prevalensi Stunting Kabupaten Pesawaran, 2024-2025".
- Wahbah Az-zuhaili. "Pelaksanaan Kebijakan Dan Penerapan Prinsip Kemaslahatan Dalam Administrasi Pemerintahan Islam," *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, n.d.
- WHO. (2019). "Child Stunting World Health Statistic Data Visualizations Dashboard,".
- Yusuf Muri. (2014). "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*." Jakarta: Prenada Media Group.